



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus di sediakan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian BHPRD merupakan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa untuk waktu 1 tahun (satu) anggaran.

BAB III PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Penghitungan BHPRD adalah sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh per seratus) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografis.

Pasal 4

- (1) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
 - a. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :

- a. $BH_x = BHPRM + RP_x$

Keterangan :

BH_x : Bagi Hasil untuk Desa X

BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa

BHPRP_x : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X

b. $BHPR_x = BD_x \times (BH - \sum BHPR)$

Keterangan :

BHPR_{Px} : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

BHPR : Total Bagi hasil untuk Kabupaten

$\sum BHPR$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

- (3) Penetapan rincian besaran bagian dari BHPRD tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana BHPRD yang diterima Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana BHPRD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana BHPRD dilakukan secara bersamaan.
- (3) Pencairan BHPRD dibagi dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per eratus);dan
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 6

- (1) Permohonan pencairan BHPRD disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Ketentuan pencairan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pencairan tahap I:
 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *soft copy* (Ekport Siskeudes);dan
 - b) Laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya.
 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan *soft copy* (Eksport Siskeudes);
 - b) Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;dan
 - c) *foto copy* Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD tahap I.
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan BHPRD;
 - b) *foto copy* rekening kas Pemerintahan Desa;
 - c) *foto copy* Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;

- d) Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan BHPRD tahap I;
 - e) Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan BHPRD tahap I; dan
 - f) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan BHPRD tahap I.
- b. Pencairan tahap II dan tahap III:
- 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap sebelumnya; dan
 - b) laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus);
 - 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a) laporan realisasi BHPRD tahap sebelumnya; dan
 - b) *foto copy* Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - a) Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan BHPRD tahap II atau tahap III;
 - b) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pencairan BHPRD tahap II atau tahap III.
- (3) Dalam hal pencairan BHPRD tahap III belum dilakukan pada tahun berjalan pencairan BHPRD tahap III dapat dilakukan paling lambat pada minggu I bulan juni pada tahun berikutnya.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di prioritaskan untuk membiayai kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dana BHPRD dapat digunakan untuk kegiatan yang langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat desa dan dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

**BAB VI
LAPORAN**

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana BHPRD dari masing masing desa kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2019, TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA DESA DAN RINCIAN PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN REKTRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP I 30% (Rp)	TAHAP II 40% (Rp)	TAHAP III 30% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Muntai	Perian	33.900.759	10.170.228	13.560.303	10.170.228
2	Muara Muntai	Muara Leka	29.892.759	8.967.828	11.957.103	8.967.828
3	Muara Muntai	Muara Aloah	31.040.759	9.312.228	12.416.303	9.312.228
4	Muara Muntai	Jantur	34.135.759	10.240.728	13.654.303	10.240.728
5	Muara Muntai	Batuq	30.604.759	9.181.428	12.241.903	9.181.428
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	31.081.759	9.324.528	12.432.703	9.324.528
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	34.379.759	10.313.928	13.751.903	10.313.928
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	29.933.759	8.980.128	11.973.503	8.980.128
9	Muara Muntai	Kayu Batu	41.973.759	12.592.128	16.789.503	12.592.128
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	34.796.759	10.439.028	13.918.703	10.439.028
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	31.086.759	9.326.028	12.434.703	9.326.028
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	32.049.759	9.614.928	12.819.903	9.614.928
13	Muara Muntai	Jantur Baru	32.848.759	9.854.628	13.139.503	9.854.628
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	56.319.759	16.895.928	22.527.903	16.895.928
15	Loa Kulu	Sungai Payang	52.094.759	15.628.428	20.837.903	15.628.428
16	Loa Kulu	Jembayan	58.714.759	17.614.428	23.485.903	17.614.428
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	41.045.759	12.313.728	16.418.303	12.313.728
18	Loa Kulu	Loh Sumber	38.522.759	11.556.828	15.409.103	11.556.828
19	Loa Kulu	Ponoragan	33.553.759	10.066.128	13.421.503	10.066.128
20	Loa Kulu	Rempanga	31.603.759	9.481.128	12.641.503	9.481.128
21	Loa Kulu	Margahayu	37.623.759	11.287.128	15.049.503	11.287.128
22	Loa Kulu	Karya Utama	32.952.759	9.885.828	13.181.103	9.885.828
23	Loa Kulu	Lung Anai	32.694.759	9.808.428	13.077.903	9.808.428
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	32.162.759	9.648.828	12.865.103	9.648.828
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	36.677.759	11.003.328	14.671.103	11.003.328
26	Loa Kulu	Sepakat	32.360.759	9.708.228	12.944.303	9.708.228
27	Loa Kulu	Sumber Sari	37.167.759	11.150.328	14.867.103	11.150.328
28	Loa Kulu	Jongkang	32.760.759	9.828.228	13.104.303	9.828.228
29	Loa Janan	Bakungan	39.668.759	11.900.628	15.867.503	11.900.628
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	54.603.759	16.381.128	21.841.503	16.381.128
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	47.893.759	14.368.128	19.157.503	14.368.128
32	Loa Janan	Purwajaya	36.300.759	10.890.228	14.520.303	10.890.228
33	Loa Janan	Tani Bhakti	32.608.759	9.782.628	13.043.503	9.782.628
34	Loa Janan	Batuah	45.062.759	13.518.828	18.025.103	13.518.828
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	48.297.759	14.489.328	19.319.103	14.489.328
36	Loa Janan	Tani Harapan	37.083.759	11.125.128	14.833.503	11.125.128
37	Anggana	Sepatin	64.702.759	19.410.828	25.881.103	19.410.828
38	Anggana	Muara Pantuan	87.655.759	26.296.728	35.062.303	26.296.728
39	Anggana	Tani Baru	50.984.759	15.295.428	20.393.903	15.295.428
40	Anggana	Kutai Lama	49.976.759	14.993.028	19.990.703	14.993.028
41	Anggana	Anggana	38.626.759	11.588.028	15.450.703	11.588.028
42	Anggana	Sungai Meriam	43.445.759	13.033.728	17.378.303	13.033.728
43	Anggana	Sidomulyo	39.208.759	11.762.628	15.683.503	11.762.628
44	Anggana	Handil Terusan	75.533.759	22.660.128	30.213.503	22.660.128
45	Muara Badak	Saliki	54.267.759	16.280.328	21.707.103	16.280.328
46	Muara Badak	Salo Palai	34.001.759	10.200.528	13.600.703	10.200.528
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	54.460.759	16.338.228	21.784.303	16.338.228
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	52.663.759	15.799.128	21.065.503	15.799.128
49	Muara Badak	Tanjung Limau	38.788.759	11.636.628	15.515.503	11.636.628
50	Muara Badak	Tanah Datar	40.239.759	12.071.928	16.095.903	12.071.928
51	Muara Badak	Badak Baru	44.117.759	13.235.328	17.647.103	13.235.328
52	Muara Badak	Suka Damai	37.435.759	11.230.728	14.974.303	11.230.728
53	Muara Badak	Badak Mekar	36.714.759	11.014.428	14.685.903	11.014.428
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	44.633.759	13.390.128	17.853.503	13.390.128
55	Muara Badak	Batu-Batu	29.850.759	8.955.228	11.940.303	8.955.228
56	Muara Badak	Salo Cella	45.343.759	13.603.128	18.137.503	13.603.128
57	Muara Badak	Sungai Bawang	35.603.759	10.681.128	14.241.503	10.681.128
58	Tenggarong	Rampak Lambur	38.286.759	11.486.028	15.314.703	11.486.028
59	Tenggarong	Bendang Raya	35.529.759	10.658.928	14.211.903	10.658.928
60	Sebulu	Sclerong	34.259.759	10.277.928	13.703.903	10.277.928
61	Sebulu	Tanjung Harapan	29.853.759	8.956.128	11.941.503	8.956.128
62	Sebulu	Beloro	32.798.759	9.839.628	13.119.503	9.839.628
63	Sebulu	Sebulu Ulu	34.259.759	10.277.928	13.703.903	10.277.928
64	Sebulu	Sebulu Ilir	33.521.759	10.056.528	13.408.703	10.056.528
65	Sebulu	Segihan	32.267.759	9.680.328	12.907.103	9.680.328
66	Sebulu	Sumber Sari	35.082.759	10.524.828	14.033.103	10.524.828
67	Sebulu	Manunggal Daya	35.817.759	10.745.328	14.327.103	10.745.328
68	Sebulu	Giri Agung	35.829.759	10.748.928	14.331.903	10.748.928
69	Sebulu	Senoni	30.868.759	9.260.628	12.347.503	9.260.628
70	Sebulu	Sebulu Moderen	36.143.759	10.843.128	14.457.503	10.843.128
71	Sebulu	Sanggulan	35.514.759	10.654.428	14.205.903	10.654.428
72	Sebulu	Leka Kidau	40.090.759	12.027.228	16.036.303	12.027.228
73	Sebulu	Mekar Jaya	31.956.759	9.587.028	12.782.703	9.587.028

74	Kota Bangun	Kedang Ipil	32.642.759	9.792.828	13.057.103	9.792.828
75	Kota Bangun	Benua Baru	33.833.759	10.150.128	13.533.503	10.150.128
76	Kota Bangun	Sedulang	30.397.759	9.119.328	12.159.103	9.119.328
77	Kota Bangun	Loleng	36.513.759	10.954.128	14.605.503	10.954.128
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	38.233.759	11.470.128	15.293.503	11.470.128
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	33.684.759	10.105.428	13.473.903	10.105.428
80	Kota Bangun	Liang	32.670.759	9.801.228	13.068.303	9.801.228
81	Kota Bangun	Muhuran	31.279.759	9.383.928	12.511.903	9.383.928
82	Kota Bangun	Pela	29.541.759	8.862.528	11.816.703	8.862.528
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	28.544.759	8.563.428	11.417.903	8.563.428
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	38.581.759	11.574.528	15.432.703	11.574.528
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	37.393.759	11.218.128	14.957.503	11.218.128
86	Kota Bangun	Sumber Sari	33.912.759	10.173.828	13.565.103	10.173.828
87	Kota Bangun	Sari Nadi	38.572.759	11.571.828	15.429.103	11.571.828
88	Kota Bangun	Suka Bumi	32.011.759	9.603.528	12.804.703	9.603.528
89	Kota Bangun	Wonosari	29.416.759	8.825.028	11.766.703	8.825.028
90	Kota Bangun	Kedang Murung	45.805.759	13.741.728	18.322.303	13.741.728
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	34.540.759	10.362.228	13.816.303	10.362.228
92	Kota Bangun	Liang Ulu	39.923.759	11.977.128	15.969.503	11.977.128
93	Kota Bangun	Sebelimbingan	29.966.759	8.990.028	11.986.703	8.990.028
94	Kota Bangun	Sangkuliman	28.362.759	8.508.828	11.345.103	8.508.828
95	Kenohan	Lamin Telihan	39.287.759	11.786.328	15.715.103	11.786.328
96	Kenohan	Lamin Pulut	30.659.759	9.197.928	12.263.903	9.197.928
97	Kenohan	Teluk Bingkai	44.834.759	13.450.428	17.933.903	13.450.428
98	Kenohan	Kahala	32.277.759	9.683.328	12.911.103	9.683.328
99	Kenohan	Tubuhan	37.220.759	11.166.228	14.888.303	11.166.228
100	Kenohan	Semayang	33.518.759	10.055.628	13.407.503	10.055.628
101	Kenohan	Teluk Muda	32.251.759	9.675.528	12.900.703	9.675.528
102	Kenohan	Tuana Tuha	54.684.759	16.405.428	21.873.903	16.405.428
103	Kenohan	Kahala Ilir	32.878.759	9.863.628	13.151.503	9.863.628
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	45.098.759	13.529.628	18.039.503	13.529.628
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	34.708.759	10.412.628	13.883.503	10.412.628
106	Kembang Janggut	Hambau	43.818.759	13.145.628	17.527.503	13.145.628
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	48.097.759	14.429.328	19.239.103	14.429.328
108	Kembang Janggut	Kelekat	37.425.759	11.227.728	14.970.303	11.227.728
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	34.485.759	10.345.728	13.794.303	10.345.728
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	33.614.759	10.084.428	13.445.903	10.084.428
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	37.414.759	11.224.428	14.965.903	11.224.428
112	Kembang Janggut	Muai	34.334.759	10.300.428	13.733.903	10.300.428
113	Kembang Janggut	Perdana	31.475.759	9.442.728	12.590.303	9.442.728
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	37.051.759	11.115.528	14.820.703	11.115.528
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	41.071.759	12.321.528	16.428.703	12.321.528
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	47.528.759	14.258.628	19.011.503	14.258.628
117	Muara Kaman	Teratak	34.620.759	10.386.228	13.848.303	10.386.228
118	Muara Kaman	Benua Puhun	39.008.759	11.702.628	15.603.503	11.702.628
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	34.901.759	10.470.528	13.960.703	10.470.528
120	Muara Kaman	Sabintulung	46.760.759	14.028.228	18.704.303	14.028.228
121	Muara Kaman	Muara Siran	31.217.759	9.365.328	12.487.103	9.365.328
122	Muara Kaman	Tunjungan	31.599.759	9.479.928	12.639.903	9.479.928
123	Muara Kaman	Sedulang	45.764.759	13.729.428	18.305.903	13.729.428
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	46.736.759	14.021.028	18.694.703	14.021.028
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	32.533.759	9.760.128	13.013.503	9.760.128
126	Muara Kaman	Sidomukti	44.452.759	13.335.828	17.781.103	13.335.828
127	Muara Kaman	Panca Jaya	34.808.759	10.442.628	13.923.503	10.442.628
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	35.505.759	10.651.728	14.202.303	10.651.728
129	Muara Kaman	Kupang Baru	50.425.759	15.127.728	20.170.303	15.127.728
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	30.056.759	9.017.028	12.022.703	9.017.028
131	Muara Kaman	Bukit Jering	40.994.759	12.298.428	16.397.903	12.298.428
132	Muara Kaman	Liang Buaya	41.599.759	12.479.928	16.639.903	12.479.928
133	Muara Kaman	Puan Cepak	34.687.759	10.406.328	13.875.103	10.406.328
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	30.059.759	9.017.928	12.023.903	9.017.928
135	Tabang	Gunung Sari	31.799.759	9.539.928	12.719.903	9.539.928
136	Tabang	Long Lalang	29.702.759	8.910.828	11.881.103	8.910.828
137	Tabang	Muara Ritan	35.004.759	10.501.428	14.001.903	10.501.428
138	Tabang	Buluk Sen	33.356.759	10.007.028	13.342.703	10.007.028
139	Tabang	Umaq Dian	30.016.759	9.005.028	12.006.703	9.005.028
140	Tabang	Muara Pedohon	31.576.759	9.473.028	12.630.703	9.473.028
141	Tabang	Bila Talang	32.342.759	9.702.828	12.937.103	9.702.828
142	Tabang	Kampung Baru	30.712.759	9.213.828	12.285.103	9.213.828
143	Tabang	Umaq Tukung	30.807.759	9.242.328	12.323.103	9.242.328
144	Tabang	Sidomulyo	31.537.759	9.461.328	12.615.103	9.461.328
145	Tabang	Umaq Bekuay	31.663.759	9.499.128	12.665.503	9.499.128
146	Tabang	Tabang Lama	29.974.759	8.992.428	11.989.903	8.992.428
147	Tabang	Muara Tiq	28.072.759	8.421.828	11.229.103	8.421.828
148	Tabang	Muara Salung	30.591.469	9.177.441	12.236.587	9.177.441
149	Tabang	Muara Kebaq	30.573.759	9.172.128	12.229.503	9.172.128
150	Tabang	Muara Belinau	30.629.759	9.188.928	12.251.903	9.188.928
151	Tabang	Muara Tuboq	30.920.759	9.276.228	12.368.303	9.276.228
152	Tabang	Ritan Baru	39.746.759	11.924.028	15.898.703	11.924.028
153	Tabang	Tukung Ritan	38.412.759	11.523.828	15.365.103	11.523.828
154	Samboja	Karya Jaya	32.104.759	9.631.428	12.841.903	9.631.428
155	Samboja	Bukit Raya	34.073.759	10.222.128	13.629.503	10.222.128
156	Samboja	Tani Bhakti	38.149.759	11.444.928	15.259.903	11.444.928
157	Samboja	Beringin Agung	37.194.759	11.158.428	14.877.903	11.158.428

158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	40,010,759	12,003,228	16,004,303	12,003,228
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	35,352,759	10,605,828	14,141,103	10,605,828
160	Tenggarong Seberang	Embalut	32,697,759	9,809,328	13,079,103	9,809,328
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	52,102,759	15,630,828	20,841,103	15,630,828
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	42,187,759	12,656,328	16,875,103	12,656,328
163	Tenggarong Seberang	Separi	58,921,759	17,676,528	23,568,703	17,676,528
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	41,241,759	12,372,528	16,496,703	12,372,528
165	Tenggarong Seberang	Buana Jaya	34,564,759	10,369,428	13,825,903	10,369,428
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	39,825,759	11,947,728	15,930,303	11,947,728
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	33,860,759	10,158,228	13,544,303	10,158,228
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	32,653,759	9,796,128	13,061,503	9,796,128
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	30,263,759	9,079,128	12,105,503	9,079,128
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	31,929,759	9,578,928	12,771,903	9,578,928
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	36,708,759	11,012,628	14,683,503	11,012,628
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	43,148,759	12,944,628	17,259,503	12,944,628
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	34,735,759	10,420,728	13,894,303	10,420,728
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	34,169,759	10,250,928	13,667,903	10,250,928
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	29,760,759	8,928,228	11,904,303	8,928,228
176	Marang Kayu	Sebuntal	56,876,759	17,063,028	22,750,703	17,063,028
177	Marang Kayu	Santan Ulu	89,030,003	26,709,001	35,612,001	26,709,001
178	Marang Kayu	Santan Tengah	33,911,759	10,173,528	13,564,703	10,173,528
179	Marang Kayu	Santan Ilir	39,096,759	11,729,028	15,638,703	11,729,028
180	Marang Kayu	Kersik	34,396,759	10,319,028	13,758,703	10,319,028
181	Marang Kayu	Bunga Putih	34,801,759	10,440,528	13,920,703	10,440,528
182	Marang Kayu	Makarti	33,350,759	10,005,228	13,340,303	10,005,228
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	39,698,759	11,909,628	15,879,503	11,909,628
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	33,458,759	10,037,628	13,383,503	10,037,628
185	Marang Kayu	Semangko	57,376,759	17,213,028	22,950,703	17,213,028
186	Marang Kayu	Sambara Baru	39,395,759	11,818,728	15,758,303	11,818,728
187	Muara Wis	Muara Wis	42,060,759	12,618,228	16,824,303	12,618,228
188	Muara Wis	Sebemban	33,747,759	10,124,328	13,499,103	10,124,328
189	Muara Wis	Melintang	43,537,759	13,061,328	17,415,103	13,061,328
190	Muara Wis	Enggelam	46,988,759	14,096,628	18,795,503	14,096,628
191	Muara Wis	Lebak Mantan	32,164,759	9,649,428	12,865,903	9,649,428
192	Muara Wis	Lebak Cilong	32,593,759	9,778,128	13,037,503	9,778,128
193	Muara Wis	Muara Enggelam	34,892,759	10,467,828	13,957,103	10,467,828
Total			7,341,642,386	2,202,492,716	2,936,656,954	2,202,492,716

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002